

KONTRAK BERJANGKA

MENGABDI DENGAN INTEGRITAS

12.0914 98.03 ↑ 3.00 12.00%
79.0276 37.28 ↑ 7.03 77.40%
26.2081 10.54 ↓ 0.67 91.62%

68.1843 19.72 ↑ 9.83 34.01%
84.7659 24.87 ↓ 4.16 53.96%

17.0738 55.01 ↑ 2.07 43.57%
41.1760 26.22 ↑ 3.00 34.00%

54.7585 13.00 ↓ 1.00 53.84%

38.4000 10.00 ↓ 0.00 91.62%

Waspadai 130 Website Investasi Ilegal

Perdagangan Sebagai Sektor
Penggerak Pertumbuhan dan
Daya Saing Ekonomi, serta
Penciptaan Kemakmuran
Rakyat

**remarkable
indonesia**

Kinerja
Bursa Berjangka
Indonesia
....10

Komoditi Jagung
Primadona
PLKA Sulut
....12

Ekspor CPO
Bakal Melalui
Bursa Berjangka?
....17



Foto : Kepala Bappebti, Sutriyono Edi, Sekretaris Bappebti, Robert J. Bintaryo, didampingi Kepala Biro Hukum, Sri Haryati dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa Bappebti, Ismadjaja Toengkagie, berdiskusi terkait pengembangan Buletin Kontrak Berjangka.

Bappebti kembali merilis temuan sebanyak 130 website investasi ilegal yang terdapat di wilayah Indonesia. Terkait itu, Bappebti telah meminta Kementerian Komunikasi dan Informasi, sebagai otoritas tertinggi untuk memblokir website investasi ilegal tersebut.

Dari sebanyak 130 website tersebut, terdapat sebanyak 106 yang berasal dari mancanegara sedangkan sisanya sebanyak 24 website merupakan jaringan yang dikembangkan di tanah air.

Tahun 2012 lalu, Bappebti juga pernah merilis sebanyak 28 website investasi ilegal dan meminta Kemenkoinfo untuk memblokirnya.

Melihat data tersebut, ternyata telah terjadi peningkatan yang cukup tajam terhadap perkembangan website investasi ilegal di tanah air yakni mencapai 464 %. Tentunya hal itu menjadi ancaman bagi masyarakat Indonesia dan menjadi batu sandungan bagi tegaknya peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Sebab itulah Bappebti berkoordinasi dengan Kemenkoinfo untuk secara bersama-sama memberantas website ilegal tersebut. Di samping itu, Bappebti pun menjalin kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama instansi berwenang lainnya.

Seperti diutarakan Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati, temuan Bappebti terhadap website investasi ilegal tersebut merupakan permulaan awal atau data yang jika kelak dapat digunakan untuk menegakan peraturan.

Namun, ada poin yang menarik

untuk disimak dari berkembangnya website investasi ilegal itu. Yakni, adanya prediksi positif terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia dari sejak tiga tahun terakhir. Seperti survey yang dilakukan McKinsey Global Institute, dikatakan tahun 2013 ini tingkat ekonomi kelas menengah masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 45 juta orang dan di tahun 2030 diperkirakan mencapai 135 juta orang. Dan di tahun 2013 ini, diperkirakan ada sekitar 60 % dari penduduk Indonesia yang berpenghasilan lebih dari US\$ 3.500 per tahun.

Itu artinya, para pelaku yang menawarkan investasi tak berizin tersebut berharap mendapatkan keuntungan dari peningkatan ekonomi Indonesia. Namun celakanya, industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia tidak berkembang sebagai mana mestinya.

Di sisi lain, jika fenomena ini terus berlangsung bukan tidak mungkin para pelaku ilegal tersebut merugikan masyarakat. Sebab itu, Bappebti senantiasa berharap agar masyarakat berhati-hati terhadap penawaran investasi yang tidak memiliki izin resmi.

Di lain pihak, pelaku perdagangan berjangka komoditi Indonesia pun perlu melakukan koreksi diri. Mengapa website investasi ilegal tersebut bisa bertumbuh hingga 464 % dan pelaku berizin resmi kalah bersaing?

Salam!

KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE

KONTRAK
BERJANGKA
MENGAJADI DENGAN INTEGRITAS



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab

Sutriyono Edi

Pemimpin Redaksi

Robert J. Bintaryo

Wakil Pemimpin Redaksi

Subagiyo

Dewan Redaksi

Sri Haryati, Pantas Lumban
Batu, Agus Muharni S.,
Harry Prihatmoko, Poppy
Juliyanti, Diah Sandita
Arisanti, Erni Artati.

Sirkulasi

Apriliyanto, Katimin.

Alamat Redaksi

Gedung Bappebti Jl. Kramat
Raya No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel
ataupun opini dikirim lengkap
dengan identitas serta foto ke

E-mail:

buletin@bappebti.go.id



Berita Utama.....	4-8
- Waspada 130 Website Investasi Ilegal	
- Menjaga Integritas Industri PBK	
Resi Gudang.....	9
- SRG Pasok Stok Komoditas Nasional	
Berjangka.....	10-11
- Kinerja Bursa Berjangka Indonesia	
Pasar Lelang.....	12-13
- Komoditi Jagung Primadona PLKA Sulut	
Agenda Foto	14-15
Aktualita.....	16-17
- Tingkat Pengaduan Investor PBK Kian Menurun	
- Ekspor CPO Bakal Melalui Bursa Berjangka?	
- IFEF Digelar JFX Tawarkan Investasi Komoditi	
- Kolaborasi Kemendag dan BKPM Jamu Investor	
Analisa.....	19
Breaknews.....	20
Info SRG.....	20-21

Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-resiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.

Wawasan...22-23

Kinerja
Gudang SRG



Kolom...24-25

Mengukur
Risiko Investasi



Kiprah...26-27

Dari Birokrat
Jadi Praktisi





12.0914	98.03	↑	3.00	12.00%
79.0276	37.28	↑	7.03	77.40%
26.2081	10.54	↓	0.67	91.62%
68.1843	19.72	↑	9.83	34.01%
34.7650	24.87	↓	4.16	53.90%
17.0738	55.01	↓	2.11	13.57%
41.1760	26.22	↓	1.11	4.19%
54.565	13.13	↓	0.13	0.99%
38.11	10.11	↓	0.11	0.89%



Waspadai 130 Website Investasi Ilegal

Sebanyak 130 website investasi on line ilegal diblokir Bappebti kerjasama dengan Kemenkoinfo. Upaya ini secara reguler dilakukan untuk melindungi masyarakat dari risiko merugi.

Tingkat ekonomi kelas menengah Indonesia yang tumbuh signifikan dari tahun ke tahun, menjadi salah satu keunggulan Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya di Asia. Dari sebuah survey yang dilakukan McKinsey Global Institute, dikatakan tahun 2013 tingkat ekonomi kelas menengah masyarakat Indonesia diperkirakan mencapai 45 juta orang dan di tahun 2030 diperkirakan mencapai 135 juta orang. Dan di tahun 2013 ini, diperkirakan ada seki-

tar 60 % dari penduduk Indonesia yang berpenghasilan lebih dari US\$ 3.500 per tahun.

Dengan indikator-indikator ekonomi tersebut, tentunya Indonesia menjadi surga atau ladang subur bagi sektor investasi. Maka dalam beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia disuguhkan berbagai pilihan investasi yang datangnya dari berbagai negara. Penawaran investasi itu baik dilakukan secara langsung maupun melalui media teknologi informasi.

Faktor pendukung suburnya

penawaran investasi on line tersebut, selain indikator ekonomi yang signifikan, yakni kurang tersedianya alternatif investasi bagi masyarakat ekonomi menengah. Faktor lain yang juga tak kalah penting, yakni belum terkoordinasinya pengawasan dan penindakan transaksi on line. Produk hukum dan peraturan yang mengawasi transaksi elektronik atau on line, baru diterbitkan pemerintah Indonesia pada tahun 2008. Sehingga produk hukum itu belum memasyarakat dan jadilah penawaran produk-produk investasi on line tum-



buh subur bak jamur di musim hujan.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan, merupakan salah satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menindak dan mengawasi perdagangan secara elektronik. Hal itu sesuai dengan Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang perubahan Un-

dang-undang No. 32 Tahun 1997, tentang perdagangan berjangka komoditi.

Selain Bappebti, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memiliki perangkat hukum dalam penindakan transaksi elektronik yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dasar hukum Kemenkoinfo yakni Undang-

undang No. 8 Tahun 2008, tentang informasi dan transaksi elektronik.

Blokir

Terkait dengan maraknya penawaran investasi on line untuk produk-produk keuangan atau pun logam mulia, dan ditransaksikan melalui situs-situs yang tidak memiliki izin baik dari Bappebti maupun dari instansi terkait, Kepala Bappebti pada awal tahun 2012 lalu, telah berkoordinasi dengan Kemenkoinfo guna menghapus sebanyak 15 website ilegal.

Dan di bulan Oktober 2013 ini, Bappebti kembali merilis sebanyak 130 website ilegal yang kemudian dilaporkan ke pihak Kemenkoinfo untuk diblokir. Website investasi on line ilegal tersebut terdiri 106 yang berasal dari luar negeri dan ada sebanyak 24 website yang bercokol di dalam negeri.

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati, 130 website tersebut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan satu per satu selama tahun 2013. "Selain 130 itu diperkirakan masih terdapat lagi website yang diindikasikan ilegal. Hanya saja belum dikategorikan ilegal karena masih dalam penelusuran," katanya.

Lebih jauh dipaparkan, informasi yang sama akan secara rutin disampaikan ke Kemenkoinfo untuk dilakukan pemblokiran. "Sebagai lembaga negara yang berwenang di bidang perdagangan berjangka komoditi akan selalu berkoordinasi dengan Kemenkoinfo untuk menutup akses website ilegal itu."

"Tentunya sebagai sesama lembaga negara yang memiliki tujuan melindungi masyarakat, Kemenkoinfo pun dengan tangan terbuka menerima informasi dari Bappebti. Dan kami pun selalu berkoordinasi dan bertukar informasi di Satgas Investasi," ujar Sri Haryati.

Sebagaimana diketahui, Satgas Investasi terdiri dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bappebti, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Koperasi dan UKM. Dari sisi penegakan hukum terdapat Polri dan Kejaksaan Agung. Sedangkan sebagai lembaga pendukung ada: Kementerian Komunikasi dan Informasi, serta Pusat Pelaporan

DAFTAR WEBSITE PIALANG ILLEGAL DALAM NEGERI

1.	www.123belajarforex.com	Lippo Cikarang – Bekasi
2.	www.a-1forex.com	a1instaforex@gmail.com +6285262048758, +6287868035805
3.	www.campusforex.blongspot.com	mister_forex@yahoo.com 081802746719 / 08999141001
4.	www.fbs.com/id	fbsforexindonesia@yahoo.com
5.	www.fbsindonesia.com	Kom. TNI AL Kodamar Sunter Kelapa Gading support@fbsindonesia.com
6.	www.fbs-indonesia.com	support@fbs-indonesia.com 089699941118
7.	www.fxcmid.com	001-8030-191-368 007-8030-191-368
8.	www.gainscope.com	info@gainscope.com +62.31.7000 8000
9.	www.gofbs.com	support@gofbs.com 082131294968
10.	www.instaafx.biz	Jalan kebon jayanti 137 bandung support@instaafx.biz 08996959949
11.	www.instaafxneo.com	instaafxneo_cs@yahoo.com +62-857-20044-636
12.	www.instasurabaya.com	support@instasurabaya.com 0856.4663.9000
13.	www.instavalas.com	BB: 324CAD00 YM: UltimaForex
14.	www.jeniusforex.com	Jl. Sunan Kalijaga, Malang (0341) 576950
15.	www.jogja-ixf.com	support@jogja-ixf.com 085729584700
16.	www.lampungtrading.com	admin@lampungtrading.com
17.	www.livetradingforex.net	a1instaforex@gmail.com +6287868035805
18.	www.medangold.com	CV. MedanGold MH. Thamrin II Medan
19.	www.mysmartfx.com	partnership@mysmartfx.com BlackBerry : 22973B4C
20.	www.nordfx.com	Jl. Asia # 115-A 202114 Medan +62617323200
21.	www.primaexchanger.com	Jln. Pluit Raya Kav 12 Telp : +62811 104 2965
22.	www.primatrading.net	Prima_trading@yahoo.com +62 811 104 2965
23.	www.pundiarta.com	Jl. Melati 16 No. 52 Telepon : 082122095560
24.	www.ramos-exchange.com	info@ramos-exchange.com 0817629403 (sms only) BBM 74324AFE



Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Temuan website investasi ilegal itu tentunya menjadi data awal atau pintu masuk baik bagi Bappebti maupun Satgas Investasi untuk melakukan penanganan jika dikemudian hari terjadi permasalahan di tengah masyarakat. Sebab itu pula sejak beroperasinya OJK, kami rutin menjalin koordinasi,” terang Sri Haryati.

Dalam penjelasan Sri Haryati, website investasi online ilegal umumnya menawarkan fixed income products, di mana produk yang ditawarkan imbal hasil (return) yang dijanjikan secara tetap dan tidak akan terpengaruh oleh risiko pergerakan harga di pasar. Selain itu, penyertaan modal investasi yang terkumpul dari masyarakat dijanjikan akan ditempatkan pada lebih dari satu instrumen keuangan atau pada sektor riil. Serta, penawaran program investasi online itu ditawarkan melalui internet dan menjanjikan pengembalian dana investasi secara rutin.

Sementara itu, modus penjualan atau penawaran produk investasi ilegal itu dilakukan melalui tenaga pemasaran secara langsung atau melalui bisnis dengan menggunakan sistem yang menyerupai pemasaran berantai. Pada beberapa kasus, penawaran produk investasi dilakukan dengan menggunakan kegiatan keagamaan untuk menarik nasabah. Ada juga yang bertindak seolah-olah sebagai agen dari perusahaan investasi yang berada di dalam maupun di luar negeri. Atau mengaku bekerja sama dengan pengelola dana investasi yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri yang telah mempunyai izin usaha dari otoritas.

Kemudian dana masyarakat yang terkumpul umumnya dijanjikan akan dikelola dan diinvestasikan melalui perusahaan Pialang Berjangka dan atau Perusahaan Efek yang sering disebut sebagai aliansi strategisnya.

Modus lain penawaran produk investasi itu sering diadakan dengan kedok acara seminar atau investor gathering, yang pada umumnya sering diikuti oleh para public figure seperti pejabat, artis, tokoh politik dan lainnya. Dan, kegiatan itu dilakukan di tempat yang mewah atau hotel berbintang guna menunjukkan bonafiditas usahanya. ▲

DAFTAR WEBSITE PIALANG ILLEGAL LUAR NEGERI

1. www.speedtrader.com
2. www.cobratrading.com
3. www.finamglobal.com
4. ru.forex-mmcis.com
5. www.aaafx.com
6. www.ironfx.com
7. www.mayzus.com
8. www.scottrades.com
9. www.tusarfx.com
10. www.3tgbrokers.com
11. www.ac-markets.com
12. www.amiralmarkets.co.id
13. www.amiralmarkets.com
14. www.afbfx.com
15. www.agea.com
16. www.alpari.com
17. www.anakbawangfx.com
18. www.andalatrading.com
19. www.asiafbs.com
20. www.askobit.com
21. www.avafx.com
22. www.avatrader.com
23. www.axitrader.com
24. www.belajar-trading.com
25. www.betonmarkerts.com
26. www.bforex.com
27. www.bfsforex.com
28. www.bmrckita.com
29. www.cakrafx.com
30. www.choicetrader.com
31. www.acehinstafx.bz
32. www.acehinsta.com
33. www.a-1frefx.com
34. www.alinstaforex.blogspot.com
35. www.citifxpro.com
36. www.cmcmarkets.com
37. www.cmsfx.com
38. www.corsacapital.org
39. www.dukascopy.com
40. www.ecn4x.com
41. www.exness.com
42. www.fbs.com
43. www.fbsneo.com
44. www.finexo.com
45. www.forex.com
46. www.forex4u.co.id
47. www.forex4u.org
48. www.forex-a1.com
49. www.fxcast.com
50. www.fxcc.com
51. www.fxclub.com
52. www.fxcm.co.uk
53. www.fxcm.com
54. www.fxcompany.net
55. www.fxd24.com
56. www.fxdana.com
57. www.fxdd.com
58. www.fxempire.com
59. www.fxind.com
60. www.fxnet.com
61. www.fxopen.com
62. www.fxoptimax.com
63. www.fxprimus.com
64. www.fxpro.com
65. www.fxwaveranger.com
66. www.gcitrading.com
67. www.getforexrebate.blogspot.com
68. www.gfcmarkets.com
69. www.gftforex.com
70. www.hantecfx.com
71. www.hmslux.com
72. www.hotforex.com
73. www.hotspotfx.com
74. www.hymarkets.com
75. www.instaforexid.com
76. www.instafx.asia
77. www.instafxtrader.com
78. www.instapips.com
79. www.interactivebrokers.com
80. www.ironfx.com
81. www.just2trade.com
82. www.lightspeed.com
83. www.liteforex.com
84. www.Ind.easy-forex.com
85. www.lqdmartets.com
86. www.markets.com
87. www.masterforex.org
88. www.maxofx.com
89. www.mbtrading.com
90. www.mrcmarkets.com
91. www.myfxbook.com
92. www.oanda.com
93. www.octafx.com
94. www.onlineforexbroker.biz
95. www.optionhouse.com
96. www.optionxpress.com
97. www.paxforex.com
98. www.pepperstone.com
99. www.placetrade.com
100. www.profit-fx.blogspot.com
101. www.roboforex.com
102. www.rvdmarkets.com
103. www.saxobank.com
104. www.sesefx.com
105. www.skyeastfx.com
106. www.sogotrading.com



Menjaga Integritas Industri PBK

Penegakan hukum mutlak dilakukan agar dapat memperbaiki citra industri PBK yang selama ini cenderung negatif.



Kepala Bappebti, Sutriono Edi

Tidak ada kata tebang pilih untuk menertibkan pelaku industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia. Siapa pun yang melanggar peraturan UU No. 10 tahun 2011 sebagai perubahan atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK, memang sudah sepatutnya ditindak tegas.

Apalagi, jika ada Pialang Berjangka yang melakukan pelanggaran dengan menipu para nasabahnya. Tentu hal itu akan menjadi momok yang sangat mencoreng citra industri PBK. Berdasarkan data pengaduan yang ada di Bappebti, memang masih terdapat banyak pengaduan dari nasabah. Tapi, menurut Kepala Bappebti, Sutriono Edi, pengaduan tersebut tidak serta merta merupakan pelanggaran ketentuan oleh Pialang Berjangka.

“Bappebti berdasarkan kewenangannya, selalu melakukan penelitian atas setiap pengaduan yang disampaikan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran dengan ketentuan di bidang PBK,” kata Sutriono Edi, di Jakarta, Oktober

2013 lalu.

Lalu, apa saja tindakan pialang yang melanggar ketentuan? “Ada beberapa modus-modus operandi atau malpraktik yang dilakukan oleh perusahaan Pialang Berjangka,” jawab Sutriono.

Dalam penjelasannya Edi, modus-modus malpraktik itu diantaranya, pertama, dalam hal pemasaran dan penerimaan nasabah, pihak yang berhubungan dengan nasabah bukan Wakil Pialang Berjangka- WPB. Melainkan memanfaatkan tenaga marketing sebagai WPB. Kemudian menerima nasabah terlarang seperti bendaharawan, pegawai negeri yang bukan profesional investor, tidak mengungkapkan risiko dan menawarkan fixed income secara langsung atau pun tidak langsung.

“Modus yang kedua, adalah pelanggaran operasional. Ada perusahaan Pialang Berjangka yang tidak melaporkan pembukaan kantor cabang, penerimaan dan penyimpanan dana nasabah, dan pembukaan rekening untuk transaksi tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan dokumen perjanjian dan tidak memiliki

persetujuan untuk kegiatan operasional tertentu,” kata Sutriono.

Lalu yang ketiga, tambahannya, pelanggaran pelaksanaan transaksi seperti memanipulasi pelaporan transaksi, transaksi tanpa amanat yang jelas dari nasabah, tidak menyerahkan rekening harian nasabah dan penyalahgunaan pin password nasabah.

Semua pelanggaran tersebut, menurut Sutriono Edi, akan dikenakan sanksi administratif oleh Bappebti. Sanksi itu seperti terperinci pada UU No. 10 tahun 2011. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis atau teguran, denda administrasi yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pencabutan izin, pembatalan persetujuan dan) pembatalan sertifikat pendaftaran.

“Dan berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1999, salah satu atau beberapa sanksi diatas dapat dikenakan kepada satu pihak untuk jenis pelanggaran yang sama,” jelasnya.

Pialang Baik

Dari kacamata Sutriono Edi, perusahaan pialang yang baik harus memiliki beberapa kriteria. Apa saja? “Perusahaan pialang berjangka itu bebas pengaduan nasabah, pialang ini biasanya telah menjalankan SOP dan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK dengan baik dan konsisten,” jawabnya.

Selain itu, perusahaan pialang harus memiliki internal kontrol yang baik kepada seluruh pegawai yang berada di bawah pengawasannya. “Pialang yang baik juga dapat ikut berpartisipasi dalam pengembangan perdagangan berjangka multilateral, dengan



menawarkan, melakukan edukasi, dan sosialisasi tentang perdagangan berjangka multilateral,” paparnya.

Tak kalah penting, tambah Sutriyono, perusahaan pialang harus dapat memenuhi kewajiban pelaporan dan persyaratan keuangan sesuai dengan ketentuan.

Sementara itu, dalam rangka perlindungan nasabah, Sutiono mengatakan, Bappebti telah melaksanakan beberapa hal. Secara preventif, Bappebti telah menerbitkan beberapa Peraturan Kepala Bappebti antara lain Pedoman Perilaku Pialang Berjangka, yang merupakan batasan Pialang Berjangka dalam berperilaku terutama dalam berhubungan dengan calon nasabah dan nasabah.

“Selain itu ada juga Peraturan Kepala Bappebti tentang Penugasan Direktur Kepatuhan, Pialang Berjangka wajib memiliki Direktur Kepatuhan yang akan melakukan pengendalian internal perusahaan terhadap SOP dan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Adapun untuk penyelesaian perselisihan, kata Sutriyono, Bappebti telah mengisyaratkan agar Pialang Berjangka memiliki standar operasional prosedur- SOP penyelesaian perselisihan dan menugaskan unit compliance- direktur kepatuhan untuk menyelesaikan perselisihan.

“Bursa Berjangka juga menyediakan sarana penyelesaian perselisihan dan terdapat Badan Arbitrasi Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) yang menyelesaikan perselisihan perdata di bidang PBK,” jelasnya.

Dalam perdagangan berjangka juga dikenal adanya istilah dana kompensasi di Bursa Berjangka. Dana itu berguna untuk membayar ganti rugi kepada nasabah karena cedera janji Pialang Berjangka. “Dana itu dibayar jika nasabah telah melakukan upaya penagihan maksimal kepada Pialang Berjangka dan telah menggunakan berbagai sarana perselisihan yang tersedia,” katanya.

Dan secara represif, kata Sutriyono, Bappebti juga telah mengenakan sanksi kepada perusahaan Pialang Berjangka atau Wakil Pialang Berjangka yang terbukti melakukan pelanggaran di bidang perdagangan berjangka komoditi.

Cegah Pelanggaran PBK



Bappebti senantiasa melakukan pengkajian dan penyempurnaan terhadap peraturan-peraturan yang telah ada. Selain itu, Bappebti juga mengkaji dan menyusun peraturan-peraturan baru sebagai langkah inovatif ataupun preventif untuk menutup celah dalam peraturan perundang-undangan di bidang PBK.

“Semua itu dilakukan dalam rangka meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang merugikan serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka,” kata Sutriyono.

Menurut Sutriyono, ada beberapa ketentuan baru yang telah diterbitkan dan sedang dalam proses penyusunan. Diantaranya :

Menurut Sutriyono, ada beberapa ketentuan baru yang telah diterbitkan dan sedang dalam proses penyusunan. Diantaranya :

1) Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, bertujuan untuk meningkatkan efektifitas pengawasan Bappebti terkait dengan kewajiban penyampaian laporan keuangan Pialang Berjangka yang dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

2) Peraturan Kepala Bappebti tentang Izin Wakil Pialang Berjangka, bertujuan untuk meningkatkan ketertiban pemberian izin, efektifitas pengawasan, dan profesionalisme Wakil Pialang Berjangka.

3) Peraturan Kepala Bappebti tentang tata cara pelaksanaan ujian profesi untuk meningkatkan profesionalisme calon Wakil Pialang Berjangka. 4) Peraturan Kepala Bappebti tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pialang Berjangka. Dengan ketentuan pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme.

5) Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Tenaga Marketing, bertujuan agar Tenaga Marketing yang membantu Pialang Berjangka dalam melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dapat diatur dan diawasi oleh Pialang Berjangka.

6) Rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Pedoman Perilaku Pialang Berjangka, merupakan penyempurnaan peraturan yang telah ada, lebih mengatur secara komprehensif tentang perilaku Pialang Berjangka yakni tindakan yang diwajibkan, maupun tindakan yang dilarang.

“Untuk rancangan Peraturan Kepala Bappebti tentang Prinsip Mengenal Nasabah, merupakan peraturan baru. Ini merupakan pedoman yang harus dijalankan oleh Pialang Berjangka dalam mengenali nasabahnya baik dari segi kemampuan keuangan, maupun dari segi pengetahuan dalam Perdagangan Berjangka,” pungkash Sutriyono Edi. ▲



SRG Pasok Stok Komoditas Nasional

Implementasi SRG akan memberikan manfaat baik bagi petani maupun Pemda dan Pemerintah Pusat.



Sistem resi Gudang (SRG) merupakan instrumen yang memiliki potensi besar untuk membantu sektor pertanian di Indonesia. Bahkan, menurut Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriyono Edi, SRG dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah maupun tingkat nasional. “Khususnya dalam penyediaan stok atau penyimpanan komoditas di gudang SRG sepanjang tahun,” jelas Sutriyono Edi, saat membuka acara sosialisasi SRG di Surabaya, Jawa Timur, Selasa, 10 September 2013 lalu.

Dalam acara sosialisasi itu, turut hadir Ketua Umum Perpadi, Pimpinan PT. Pertani, Pimpinan Bank BRI, Pimpinan Bank Jatim, para pejabat Eselon II di lingkungan Kemendag, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Provinsi Jawa Timur, perwakilan dari Dinas Pertanian, Dinas Perkebu-

nan, serta perwakilan dari instansi terkait lainnya.

Dalam sosialisasi yang diikuti oleh para anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) seluruh Indonesia itu, Sutriyono secara luas menjabarkan pentingnya manfaat SRG. Menurutnya, dengan adanya persyaratan mutu komoditas dalam penyimpanan komoditas di gudang, maka pelaksanaan SRG dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing komoditas yang dihasilkan oleh para petani.

“Sehingga komoditas tersebut menjadi kompetitif baik di dalam perdagangan domestik maupun internasional,” jelasnya.

Selain itu, kata Sutriyono, dengan memiliki resi gudang, para pelaku usaha, khususnya petani, kelompok tani, koperasi, serta usaha kecil dan menengah (UKM) dapat memperoleh kredit di bank tanpa memberikan jaminan

atau fixed asset lainnya, seperti tanah, rumah dan kendaraan bermotor.

“Jaminan pengajuan kredit di bank adalah resi gudang itu sendiri yang merupakan bukti kepemilikan barang yang disimpan di gudang. Kredit tersebut dapat dijadikan modal bagi petani untuk membiayai produksi masa tanam berikutnya, termasuk beli pupuk, bibit dan biaya kehidupan sehari-hari. Selain itu, para pelaku usaha juga dapat meningkatkan permodalan usahanya,” kata Sutriyono.

Mitra SRG

Sebagai catatan, secara akumulatif hingga 18 Agustus 2013, telah diterbitkan sebanyak 952 resi gudang dengan total volume komoditas sebanyak 39.346,94 ton, yang terdiri dari 33.888,16 ton gabah; 3.737,20 ton beras; 1.374,20 ton jagung; 20,39 ton kopi; dan 327 ton rumput laut, dengan total nilai Rp. 189,53 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Sutriyono Edi juga berharap, Perpadi ke depan dapat menjadi mitra dalam pemberdayaan dan pengembangan implementasi SRG di Indonesia.

“Anggota Perpadi agar dapat menjadi Pengelola Gudang dan sekaligus sebagai standby buyer bagi komoditas milik petani yang disimpan di gudang SRG,” harapnya.

Singkatnya, SRG merupakan salah satu instrumen yang sangat dibutuhkan untuk perekonomian bangsa Indonesia. Meski demikian, Sutriyono menegaskan, implementasi SRG di daerah baru akan dapat terwujud dengan adanya kerja sama yang sinergis dengan banyak pihak terkait. ▲



Kinerja Bursa Berjangka Indonesia

Pertumbuhan transaksi bursa berjangka Indonesia naik cukup signifikan. Namun, transaksi SPA masih mendominasi dari total transaksi. Langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan baik bursa maupun Bappebti mendongkrak transaksi kontrak multilateral?



Di atas kertas, total transaksi di Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI) meningkat jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tercatat, sejak Januari s.d Oktober (Minggu ke-1) 2013, transaksi di dua bursa mencapai 18.437.331,24 lot dengan nilai Rp 15.942.749.710.

Dari total transaksi tersebut, transaksi kontrak multilateral baru mencapai 994.749 lot dengan nilai Rp 172.535.210. Adapun Sistem Perdagangan Alternatif (SPA) atau juga dikenal transaksi bilateral menembus 17.441.827,24 lot dengan nilai Rp 15.763.288.380. Sedangkan transaksi Penyaluran Amanat Luar Negeri (PALN) mencapai 755.00 lot dengan

nilai Rp 6.931.120.

“Transaksi multilateral jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat sebesar 114.562 lot atau naik 13.04%. Tapi, transaksi kontrak komoditi multilateral dibanding transaksi SPA baru mencapai 5,70% dan masih memiliki selisih yang jauh yaitu lebih dari 13,3 juta lot,” kata Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Sutriono Edi, di Jakarta, Oktober 2013 lalu.

Sementara jika dipisahkan, maka perkembangan transaksi untuk masing-masing bursa sebagai berikut. Di JFX, tercatat 3.687.738,70 lot dengan nilai Rp.14.794.643.940 (multilateral 263.898 lot atau Rp 114.787.020 dan SPA sebanyak 3.414.840,70 lot atau Rp 14.679.856.920. Dengan demikian, transaksi kontrak multilateral hanya

mencapai 7,76 % jika dibandingkan dengan total volume transaksi SPA. Tapi, hingga Oktober (Minggu ke-1) 2013 transaksi multilateral meningkat 123.123 lot atau naik 86.70 % year on year.

Dan di BKDI, transaksi mencapai 14.758.592,54 lot dengan nilai Rp 1.148.105.770 (multilateral 730.851 lot atau senilai Rp 57.748.190, PALN 755 lot atau Rp 6.931.120 dan SPA 14.026.986,54 lot atau senilai Rp 1.148.105.770).

Pembatasan SPA

Tentunya, dengan pencapaian total transaksi di dua bursa tersebut, harus diakui transaksi kontrak multilateral masih terisih jauh oleh transaksi perdagangan SPA. Dan pencapaian itu, memang belum sepenuhnya dapat mewujudkan Amanat UU Perdagangan Berjangka Komoditi untuk menjadikan perdagangan berjangka sebagai sarana pembentukan harga (price discovery) dan sarana lindung nilai (hedging).

Lantas, bagaimana Bappebti menyikapinya?

“Bappebti sudah mengeluarkan surat edaran tentang moratorium SPA, sehingga ke depan Bappebti sudah tidak akan mengeluarkan izin terhadap pelaku usaha yang akan memperdagangkan kontrak SPA. Bappebti juga merencanakan akan membatasi jumlah kontrak SPA yang diperdagangkan,” jawab Sutriono.

Selain itu, kata Sutriono, Bappebti tetap konsisten dalam mendorong pelaku usaha untuk melakukan transaksi komoditi multilateral, sebagaimana komitmen Bappebti un-



tuk meningkatkan kontrak komoditi primer hingga mencapai angka 30 %.

“Untuk itu, sangat penting bagaimana produk yang ditawarkan oleh Bursa Berjangka dapat menarik dan banyak diminati para investor melalui Pialang Berjangka,” katanya.

Di sisi lain, hingga saat ini perkembangan industri PBK terus mengalami peningkatan. Sutriono Edi mengatakan, untuk kelembagaan PBK meliputi, Kliring Berjangka yang terdiri dari PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan PT. Identrust Security International. “Selain itu, ada 6 Bank Penyimpan Margin, diantaranya BNI, Bank Sinar-mas, Bank Niaga, BCA, Standard Chartered Bank, dan Bank Windu,” jelasnya.

Sementara, untuk Pelaku Usaha PBK yang mendapatkan izin dari Bap-pebti diantaranya, 2 Bursa Berjangka (JFX & BKDI), 69 Pialang Berjangka, 2.325 Wakil Pialang Berjangka dan 221 kantor cabang Pialang Berjangka, 69 Pedagang Berjangka, 60 Peserta SPA dan 15 Penyelenggara SPA, serta 2 Pialang PALN.

Adapun untuk komoditi yang sudah ditransaksikan di Bursa Berjangka juga terus berkembang dan semakin beragam. Tercatat, kontrak berjangka di JFX meliputi Olein, Emas, dan Kakao beserta turunannya. Sedangkan kontrak berjangka di BKDI diantaranya, CPO, Olein, Emas dan Mata Uang Asing beserta turunannya.

Sinyal Positif

Perlahan namun pasti, transaksi komoditi primer di Bursa Berjangka bergerak menuju pembentukan harga referensi bagi para produsen. Menurut Sutriono, sejak 1 Juli 2013 lalu, Kementerian Perdagangan telah menetapkan kebijakan tentang perhitungan harga patokan ekspor (HPE) untuk produk sawit dengan menggunakan acuan 60 % dari kontrak CPO di BKDI.

Namun, ungkap Sutriono, perkembangan transaksi kontrak CPO di BKDI untuk periode Januari sampai Agustus 2013 mengalami penurunan sebanyak 4,32 % atau turun sebesar 24.029 lot, jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012 yang mencapai 556.386 lot.

Sementara itu, untuk perkembangan

Perkembangan Volume Transaksi Bursa Berjangka

NO	JENIS KONTRAK	2011	2012	Perub. %	Jan-Sep 2012	Jan-Sep 2013	Perub. %
1	Kontrak Multilateral	951,328	1,136,336	19.45	863,852	979,803	13.42
2	Penyaluran Amanat Luar Negeri	710,000	2,286	-99.68	2,095	749	-64.25
3	Sistem Perdagangan Alternatif (SPA)	7,508,080	8,326,497	10.90	5,429,269.10	17,252,216.84	217.76
TOTAL		8,460,118	9,465,119	11,88	6,295,216.10	18,232,609.84	189.63

* Komoditi yang ditransaksikan di Bursa Berjangka adalah: CPO, Olein, Emas, Kakao, Timah dan Mata Uang Asing.

* Kontribusi transaksi multilateral pada periode Jan-Sept 2013 hanya sebesar 5,37%, dimana kontrak SPA masih mendominasi transaksi PBK dengan kontribusi sebesar 94,62%.

transaksi emas di BKDI untuk periode Januari sampai Agustus 2013 mengalami peningkatan sebanyak 8.55 %, atau naik sebanyak 8.020 lot bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2012 yang membukukan 93.810 lot.

Kabar baiknya, kata Sutriono, untuk harga timah di Bursa Timah Indonesia (BTI) yang diselenggarakan oleh BKDI, kini telah menjadi harga rujukan timah dunia. “Hal ini terbukti dari makin meningkatnya harga timah sejak di-launching Pasar Fisik Timah untuk ekspor di BKDI oleh Bapak Menteri Perdagangan. Harga timah juga cenderung terus meningkat berkisar antara 7,3 %,” katanya.

Sebagai catatan, pada perdagangan perdana di BTI pada 30 Agustus 2013 lalu, harga timah berada di posisi US\$ 21.510 per ton. Dan pada perdagangan selanjutnya harga timah merangkak naik, seperti pada minggu ke-1 (2-6 September) harga US\$ 21.896 per ton, minggu ke-2 (9-13 September) US\$ 22.840 per ton, minggu ke-3 (16-20 September) US\$ 22.969 per ton dan minggu ke-4 (20-26 September) US\$ 23,195 per ton, serta pada minggu pertama Oktober (03 - 11 Oktober) harga timah berada di posisi US\$ 23.300 - 23,500 per ton.

Hingga saat ini, kata Sutriono, Indonesia telah berperan tidak lagi sebagai price maker akan tetapi sudah menjadi price taker dan referensi harga timah dunia. Peningkatan harga tersebut menunjukkan perkembangan harga yang baik. Karena sebelum diperdagangkannya di BTI per 30 Agustus 2013 lalu, harga timah London Metal

Exchange (LME) berada di kisaran US\$ 20.900-21.100 dan hingga bulan Oktober (11 Oktober) harga Timah berkisar antara US\$ 23,300 - 23,500 per ton.

“Pemerintah berharap harga timah terus menerus membaik sehingga tujuan menjadikan harga timah di BTI sebagai referensi harga timah dunia kiranya dapat terealisasi,” ujarnya. Dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, Indonesia lebih mengutamakan kenaikan harga ekspor timah dari pada volumenya. Sebab, dengan harga ekspor timah yang tinggi walaupun dengan volume ekspor yang tetap, maka akan diperoleh devisa yang jauh lebih besar dari pada volume ekspor meningkat tetapi harganya turun.

Selain itu, dengan makin baiknya peningkatan harga timah tentunya akan meningkatkan pendapatan para penjual/produsen/smelter. Di sisi lain, produk ekspor timah batangan juga telah meningkat nilai jualnya. Sebab, timah yang diekspor merupakan timah batangan yang memiliki kandungan timah 99.99 %.

Kendati demikian Sutriono memperkirakan, untuk sementara waktu akan terjadi penurunan volume timah yang akan diekspor, namun perlahan dengan adanya perbaikan harga maka pendapatan para produsen timah akan meningkat.

“Diperlukan dukungan kerjasama dan koordinasi yang baik antar pelaku usaha timah nasional maupun dengan pemerintah untuk bersinergi demi mengoptimalkan manfaat industri timah bagi perekonomian masyarakat dan nasional,” tegas Sutriono. ▲



Komoditi Jagung Primadona PLKA Sulut

Penyelenggaraan pasar lelang membuat posisi tawar petani makin tinggi, sehingga harga komoditi menjadi lebih tinggi dan menguntungkan petani.

kg dengan total transaksi Rp 7 miliar.

Selain komoditi jagung, komoditi lainnya yang dilelang pada pelaksanaan PLKA ke-6 tahun 2013 itu, antara lain komoditi beras, gula merah, ikan nila, salak dan telur bebek.

Kepala Disperindag Sulut, Olvie Atteng, mengungkapkan, adanya PLKA diharapkan membantu penjual dan pembeli berbagai komoditi yang ada di Sulut, sehingga menguntungkan kedua belah pihak. "Kami hanya membantu untuk mempertemukan kedua belah pihak," katanya.

Berbagai komoditas unggulan di Sulut kedepannya akan didorong untuk dilakukan pengemasan yang lebih baik lagi. Sehingga dijual tidak lagi bahan mentah saja, melainkan sudah menjadi kemasan. "Hal tersebut dilakukan agar nilai jualnya menjadi bertambah."

Menurut Olvie, seperti komoditi gula semut bisa dikemas dalam sachet kemudian baru dijual dengan harga yang lebih tinggi dan dipasarkan di wilayah Sulut. "Selama ini gula semut yang ada di hotel-hotel atau pun di restoran asalnya dari luar Sulut. Padahal Sulut memiliki gula semut terbaik, namun saat ini belum dikemas secara baik."

"Inilah salah satunya manfaat penyelenggaraan pasar lelang, kita bisa melihat potensi komoditi yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya. Sehingga kami pun bisa melakukan pembinaan untuk mendorong peningkatan ekonomi UKM," terang Olvie Atteng.

Sementara itu menurut Marten Sirapa, Staf Perdagangan Dalam Negeri Disperindag, Sulut, mengatakan,

Komoditi jagung merupakan komoditi primadona pada penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Agro (PLKA) yang digelar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulawesi Utara (Sulut) di Hotel Sahid Teling, pada 17 Oktober 2013, lalu. Hal itu tampak dari antusiasnya para pembeli yang melakukan penawaran dari harga yang disajikan penjual.

Dari transaksi antara penjual dan pembeli berdasarkan rekapitulasi yang

dikeluarkan Disperindag Sulut, tercatat nilai transaksi komoditi jagung mencapai sebesar Rp 19.313.750.000 atau 97,49% dari total transaksi pasar lelang tersebut sebesar Rp 19.811.750.000.

Transaksi terbesar dalam komoditi jagung dilakukan oleh Haji Nasir Arbi yang menjual kepada Widiawati Sangkala sebanyak 4.000 ton dengan harga per kg Rp 3.000 dengan total transaksi mencapai Rp 12 miliar. Dan transaksi terbesar kedua terjadi antara Sartono Latief dengan Nasir Arbi sebanyak 2.000 ton dengan harga Rp 3.600 per



“
Para pembeli komoditi jagung di pasar lelang Manado tidak saja dari kalangan pedagang, melainkan juga parbik pakan ternak yang ada di Pulau Jawa. Kenyataan ini membuat jumlah persediaan jagung di petani menyusut dan harga pun cenderung tinggi.”

penyelenggaraan pasar lelang Manado semakin mendapatkan bentuknya. Hal itu tampak dari setiap penyelenggaraan pasar lelang komoditi jagung merupakan primadona para peserta.

“Para pembeli komoditi jagung di pasar lelang Manado tidak saja dari kalangan pedagang, melainkan juga parbik pakan ternak yang ada di Pulau Jawa. Kenyataan ini membuat jumlah persediaan jagung di petani menyusut dan harga pun cenderung tinggi,” kata Marten.

Sebelum masuknya pabrikan pakan ternak itu ke pasar lelang Manado, tambah Marten, harga jagung di tingkat petani paling tinggi dikisaran Rp 3.000 per kg. “Tetapi sekarang harga jagung bisa mencapai Rp 3.600 per kg.”

“Jadi sekarang para petani sudah mulai menahan komoditi jagungnya untuk dipasarkan melalui pasar lelang. Dengan harapan harga jagung menjadi lebih baik,” jelas Marten.

Prioritas

Sulawesi Utara selama ini memang dikenal sebagai salah satu sentra produksi komoditi jagung dengan jumlah yang cukup besar. Terkait itu, Disperindag Sulut untuk masa mendatang akan memprioritaskan penyelenggaraan pasar lelang pada ko-

moditi jagung.

“Disperindag Sulut dalam pengembangan pasar lelang di masa mendatang akan prioritas komoditi jagung sebagai komoditi unggulan. Memang masih cukup banyak komoditi unggulan lain yang bisa ditawarkan di pasar lelang Sulut, tetapi yang telah tampak pelakunya saat ini adalah komoditi jagung,” kata Marten Sirapa.

Mungkin ke depan dalam penyelenggaraan pasar lelang Sulut, tambah Marten, akan dilaksanakan dengan pola yang berbeda. “Ada pasar lelang yang dikhususkan untuk komoditi unggulan tetapi ada juga pasar lelang yang ditujukan pada komoditi lain yang memiliki potensi pasar. Misalnya seperti komoditi kopra, cengkeh, kakao, gabah, beras dan produk-produk kelautan seperti rumput laut dan ikan cukup banyak ditemukan di Sulut,”

“Selain komoditi tersebut, saat ini pun muncul permintaan yang cukup banyak terhadap kayu sengon di pasar lelang Sulut. Permintaan kayu sengon tersebut berasal dari pengusaha di Pulau Jawa, untuk digunakan sebagai bahan baku batang korek api dan sebagai kemasan,” katanya.

“Karena itu kami pun sudah merencanakan penyelenggaraan pasar lelang di beberapa kabupaten yang

menjadi sentra produksi komoditi,” ujar Marten.

Penyelenggaraan pasar lelang di sejumlah kabupaten di Sulut itu, selain membuka pasar yang lebih luas juga untuk meningkatkan animo petani terhadap pasar lelang, tambahnya. “Untuk itu, kami pun mengupayakan penyelenggaraan pasar lelang di wilayah kabupaten dengan anggaran yang berasal APBD.”

“Sebab itu, kami pun sudah menjalin koordinasi dengan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pertanian, untuk secara bersama-sama meningkatkan hasil produksi para petani melalui penyuluhan,” terang Marten.

Dalam kaitan program pengembangan pasar lelang Sulut di masa mendatang yang dikelola secara profesional, menurut Marten, Disperindag Sulut telah menetapkan beberapa langkah strategis. Diantaranya, mempersiapkan mekanisme pasar lelang melalui media digital atau on-line.

“Secara paralel kami pun sedang mencari pihak-pihak yang bisa menyelenggarakan pasar lelang dengan mandiri dan profesional. Nantinya bisa saja pasar lelang itu dilaksanakan pihak swasta atau pun badan usaha milik daerah (BUMD),” pungkas Marten Sirapa. ▲



Agenda Foto



Sekretaris Bappebti, Robert J Bintaryo mewakili Kepala Bappebti menjadi narasumber dalam acara Seminar PBK di kampus Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. Acara dibuka oleh Wakil Dekan 4 Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti Prof. Farah Margaretha, PhD. Acara tersebut bertujuan memberikan pengenalan mengenai PBK kepada para akademisi serta kepada masyarakat luas. Hadir dalam seminar diantaranya, Perwakilan dari BKDI, Perwakilan dari IM futures dan mahasiswa Universitas Trisakti. Jakarta, 4 Oktober 2013.



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi didampingi Pejabat Eselon II Bappebti di ruang Kerja Kepala Bappebti, diwawancarai oleh wartawan Majalah Investor, dengan tema perkembangan industri PBK dan SRG di Indonesia. Jakarta, 24 Oktober 2013.



*Kepala Bappebti, Sutriyono Edi dan Sekretaris Bappebti, Robert J Bintaryo menghadiri sekaligus memberikan arahan pada acara Konsinyering Buletin Kontrak Berjangka . Dalam arahnya, Sutriyono Edi mengharapkan agar pendistribusian Buletin Kontrak Berjangka tersebar ke seluruh Instansi atau lembaga yang terkait. Sehingga, Buletin ini dapat lebih kenal oleh masyarakat luas. Dalam acara itu, hadir perwakilan dari Biro-Biro di Bappebti yang juga merupakan bagian dari Tim Redaksi Buletin Kontrak Berjangka. **Jakarta, 18 Oktober 2013.***

Tingkat Pengaduan Investor PBK Kian Menurun



Berdasarkan data pengaduan masyarakat atau investor yang masuk ke Bappebti, semakin menurun seiring dengan ketatnya peraturan dan semakin tereduksinya baik masyarakat maupun pelaku industri perdagangan berjangka komoditi.

“Hingga saat ini memang masih terdapat banyak pengaduan ma-

syarakat. Namun, pengaduan tersebut tidak serta merta merupakan pelanggaran ketentuan oleh Pialang Berjangka. Bappebti berdasarkan kewenangan yang dimiliki, melakukan penelitian atas setiap pengaduan yang disampaikan untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran ketentuan di bidang PBK,” ujar Kepala Bappebti, Sutriono Edi.

Lebih jauh diutarakan, efektivitas Bappebti dalam melakukan pengawasan dilakukan secara berjenjang. Step pertama adalah melalui Wakil Pialang Berjangka- WPB. “Bappebti secara reguler melakukan penyegaran terhadap ketentuan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pemahaman WPB di bidang perdagangan berjangka komoditi.”

“Step kedua, melalui dengan penugasan Direktur Kepatuhan di setiap perusahaan Pialang Berjangka. Direktur Kepatuhan itu sifatnya independen disetiap perusahaan, dan tugasnya melakukan pengawasan internal terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada,” jelas Sutriono.

Kemudian yang ketiga, tambahnya, adalah pengawasan yang dilakukan oleh bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. “Dua lembaga itu juga turut melakukan pengawasan terhadap integritas pasar dan integritas keuangan. Kemudian yang terakhir, pengawasan yang dilakukan Bappebti kepada seluruh pelaku usaha dan sistem perdagangan yang digunakan,” papar Sutriono Edi. ▲

Kolaborasi Kemendag dan BKPM Jamu Investor



Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil mengumpulkan sekitar 600 orang dari kalangan dunia usaha, eksportir, investor, akademisi, dan asosiasi untuk berdialog mengenai upaya peningkatan volume perdagangan dan investasi Indonesia. Dialog tersebut dikemas dalam Trade and Investment Forum yang diselenggarakan selama dua hari, 17-18 Oktober 2013, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Seminar tersebut mengambil tema “Trade to Invest in Remarkable Indonesia: Enhancing Export and Domestic Market through Investment.” Pemerintah berharap kolaborasi perdagangan dan investasi itu dapat menghasilkan kemajuan pembangunan ekonomi yang signifikan karena keduanya saling terkait dan mendukung peningkatan satu sama lain.

“Melalui pertemuan seperti ini, kami tidak hanya memberi informasi melainkan juga membantu mencari solusi bagi permasalahan yang dihadapi dunia usaha,” jelas Mendag Gita Wirjawan.

Sementara itu, Kepala BKPM, Mahendra Siregar, mengatakan, tujuan diselenggarakannya acara tersebut agar para investor dapat memahami lebih jauh potensi investasi di Indonesia, khususnya di daerah-daerah.

Kegiatan lain yang termasuk dalam rangkaian acara Trade and Investment Seminar adalah Regional Discussion. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai produk-produk potensial dan akses pasar luar negeri. Sebagai pembicara adalah Duta Besar Republik Indonesia di luar negeri, Atase

Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Centre (ITPC), serta Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Adapun materi yang akan disampaikan antara lain mengenai tantangan dan peluang dalam menerobos pasar luar negeri untuk sektor tertentu, persyaratan perdagangan untuk sektor tertentu, serta kebijakan pemerintah asing terkait perdagangan yang dijelaskan dalam gambaran umum.

Target peserta Regional Discussion ini adalah sekitar 60 peserta yang terdiri dari para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan calon eksportir.

“Kami akan membagi mereka ke dalam tujuh kelas yang didasarkan pada wilayah tujuan ekspor, yaitu kawasan ASEAN, Australia-New Zealand (ANZ), Asia non-ASEAN, Timur Tengah, Eropa bagian Timur, Eropa bagian Barat, Amerika dan Afrika,” urai Gita.

“Selain informasi dan solusi, kami berharap melalui forum seminar dan konseling ini, para pelaku usaha di Indonesia dapat langsung menjalin networking dengan calon mitra dagang,” tandas Mendag Gita Wirjawan. ▲

IFEF Digelar JFX Tawarkan Investasi Komoditi

Meški kondisi ekonomi Indonesia tengah bergejolak, tidak mematahkan antusias masyarakat yang ingin berinvestasi. Pertumbuhan konsumsi dan pertumbuhan kelompok masyarakat kelas menengah masih positif. Daya beli masyarakat masih cukup baik, sehingga berimplikasi pada perkembangan investasi.

“Pengetahuan masyarakat akan investasi pun semakin berkembang. Investasi dengan risiko tinggi tidak akan menjadi pilihan masyarakat,” demikian dikatakan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kusumaningtuti Sandriharmy Soetiono, usai membuka penyelenggaraan Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2013 di Jakarta Convention Center (JCC) 4-6 Oktober 2013.

Tahun ini IFEF mengambil tema “Invest Now for A Better Tomorrow” atau “Investasi sejak Dini demi Masa Depan Finansial yang Gemilang”.



Dalam pameran kali ini, perusahaan keuangan berlomba-lomba menawarkan produk investasinya. Peserta pameran ini mulai dari bursa, bank, perusahaan sekuritas, pialang bursa berjangka, manajer investasi, firma perencanaan keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan-perusahaan lain penyedia jasa pendukung industri keuangan dan pasar modal, serta perusahaan properti.

Dalam kesempatan itu, Komisiner OJK, Kusumaningtuti Soetiono, sempat berkunjung dan menemui Direktur Jakarta Futures Exchange (JFX) Bihar Sakti

Wibowo di booth JFX pada Jumat 4 Oktober 2013 lalu.

“Peran serta JFX dalam event ini untuk mendorong minat masyarakat untuk lebih mengenal transaksi dan investasi komoditi,” kata Bihar.

JFX ikut ambil bagian pada IFEF ini sebagai penyedia solusi menyeluruh bagi masyarakat untuk merancang dan mewujudkan investasi sejak dini, sehingga masyarakat bisa mencapai tujuan-tujuan finansial mereka di masa mendatang, tambah Bihar Sakti Wibowo. ▲

Ekspor CPO Bakal Melalui Bursa Berjangka?

Setelah sukses dengan mewajibkan ekspor timah melalui bursa Indonesia sehingga bisa mengerek harga timah, kini pemerintah berencana segera menerapkan kebijakan tersebut pada komoditas curde palm oil (CPO). Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Mrisnamurthi, mengaku sangat bangga dengan kenaikan harga timah Indonesia setelah diterapkannya kebijakan wajib ekspor melalui bursa di dalam negeri. Dengan demikian, diharapkan ke depannya harga timah dunia akan mengacu pada bursa Indonesia dan bisa menjadi penentu harga.

“Very good. Ya kita lihat nanti pelaksanaan ekspor CPO melalui bursa berjangka Indonesia, tetapi bertahap ‘lah,” kata Bayu dalam sebuah kesempatan baru-baru ini.

Kewajiban ekspor timah melalui bursa berjangka dalam negeri tersebut tertuang pada Permendag No. 78/M-DAG/



PER/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Timah. Sejak kebijakan tersebut diberlakukan per 30 Agustus 2013 lalu, harga timah Indonesia terkerek dari US\$ 21,100 per ton menjadi US\$23,100 per ton atau mengalami kenaikan sebesar 9,4%.

Sementara itu, untuk komoditas kelapa sawit (CPO) yang merupakan penghasil terbesar adalah Indonesia,

harga internasional masih mengacu pada Bursa di Malaysia (MDEX/Malaysia Derivatives Exchange) dan Bursa Belanda Rootterdam CIF. Saat ini meski Indonesia merupakan produsen terbesar dari komoditas ini, namun tak mampu menjadi penentu harga dunia. Dan harga CPO internasional sekarang ini jatuh di level US\$815-840 per ton. ▲

Ekspor Karet Sumut Cenderung Naik



Volume ekspor karet anggota Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumatera Utara (Sumut) pada triwulan III tahun ini naik 1,81 % menjadi 379.212.896 kg.

“Pada Januari-September 2012 lalu, ekspor karet anggota Gapkindo masih sebesar 372.477.453 kg,” kata Sekretaris Eksekutif Gapkindo Sumut, Edy Irwansyah.

Menurut dia, tren kebutuhan karet menguat menjelang akhir tahun yang diduga dilakukan importir untuk memenuhi kebutuhan pabrikan akhir tahun hingga awal 2014.

Dia menjelaskan seperti biasanya, di luar negeri pada akhir tahun, pabrikan tutup dalam jangka waktu lama sehingga pengusaha melakukan penambahan produksi.

Kalau pada Agustus ekspor masih sebanyak 35.672.759 kg, maka pada September mencapai 44.318.976 kilogram. Meski permintaan naik tetapi harga jual belum meningkat signifikan.

Harga karet pada 17 Oktober mencapai US\$ 2,341 per kg untuk pengapalan November dan US\$ 2,350 per kg pada Desember. Harga terus menguat untuk pengapalan di bulan Januari 2014 atau sebesar US\$ 2,368 per kg.

Adapun harga bahan olah karet (Bokar) di tingkat pabrik mencapai Rp 22.208-Rp24.208 per kg. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumut, Ivan Iskandar Batubara menyebutkan, harga jual yang tren melemah saat krisis global menjadi pelajaran berharga antara lain untuk melepas ketergantungan ekspor khususnya dalam bentuk bahan baku atau setengah jadi.

Kalau penjualan di dalam negeri bisa ditingkatkan dan termasuk menjual dalam bentuk produk jadi, harga jual masih bisa dipertahankan stabil dengan tren menguat. ▲

Teh Indonesia Popular di Mancanegara

Ketua Umum Asosiasi Teh Indonesia (ATI) Dede Kusdiman mengatakan, pamor teh di Indonesia masih kalah hanya karena pengetahuan atau informasi tentang teh yang belum tersampaikan. Padahal sebenarnya, kualitas teh Indonesia tidak kalah. Bahkan seringkali teh Indonesia dibeli negara lain, lalu dijual kembali dengan merek luar negeri.

“Harusnya dengan menggelar Festival Teh Jabar selama tiga hari di Cikampung Timur, masyarakat sadar dan mau mengonsumsi teh berkualitas. Dulu mungkin bangsa kita mengenal teh jenis merah yang paling berkualitas. Padahal teh merah berkualitas nomor tiga. Ini mungkin karena dulu kita dibodohi Belanda sehingga yang bagus diekspor ke luar dan Indonesia hanya minum yang kualitas rendah,” kata Dede yang juga Kepala Bagian Tanaman di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII di Kota Bandung.

Meski sudah mengalami peningkatan, Dede mengatakan konsumsi teh di Indonesia hingga saat ini masih rendah atau hanya sekitar 300 gram per kapita per tahun sedangkan konsumsi teh di London sudah mencapai 2 kg per kapita per tahun. Inilah menurut Dede yang membuat teh Indonesia lebih banyak diekspor.

Dede mengatakan total produksi teh

di Indonesia mencapai 150 ribu ton per tahun. Sebanyak 80 persen produk teh Indonesia diekspor ke Jerman, Belanda, Irak, Moskow, Jepang, Australia, dll. Teh yang diekspor sebagian besar adalah teh hitam dan teh hijau. Namun dalam dua tahun terakhir, teh putih (white tea) juga sudah diekspor ke Jepang.

“Harga white tea berkali-kali lipat dibanding teh yang lain. Harganya mahal karena yang prosesnya yang sulit dan hanya menggunakan pucuk paling ujung. Permintaan teh putih ini belum banyak, baru sekitar 1.000 ton,” kata Dede.

Dede juga mengatakan munculnya teh Vietnam di Indonesia harus menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah. Meski harga teh Vietnam bersaing dengan harga teh Indonesia tetapi kualitas teh Indonesia tetap lebih baik.

“Inggris punya syarat ketat agar teh bisa masuk ke negaranya. Teh kita bisa masuk tetapi teh Vietnam tidak bisa masuk ke sana. Mungkin karena tidak laku, jadi dijual di sini,” katanya.

Harga bagi masyarakat menurut Dede bukan menjadi persoalan. Belum tingginya konsumsi teh menurut dia ada di persoalan pengetahuan. Dia berharap teh bukan lagi dianggap minuman seadanya dan bisa dinikmati karena cita rasanya dan kandungannya yang baik untuk kesehatan. ▲

Eurochocolate Berminat Dengan Kakao Indonesia



Presiden Eurochocolate, Eugenio Guarducci, menawarkan kerjasama lebih jauh dengan Pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan nilai ekspor coklat Indonesia ke Italia. Hal itu diungkapkan Eugenio Guarducci dalam pertemuan dengan Dubes RI di Roma, Italia, August Parengkuan, pada sela-sela pameran Eurochocolate yang berlangsung di Kota Perugia, Italia.

Di sisi lain dikatakan, Guarducci, pihaknya juga menawarkan bantuan jika Indonesia berminat untuk menyelenggarakan event bertaraf internasional terkait komoditi kakao.

Kerjasama Eurochocolate dengan Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan ekspor kakao Indonesia ke Italia. Dan, keikutsertaan Indonesia sebagai Guest Country dalam pameran Eurochocolate 18 - 27 Oktober 2013 di kota Perugia, Italia, itu, diikuti 600 peserta dari berbagai negara dan diperkirakan dikunjungi satu juta pengunjung.

Dalam pameran itu Indonesia menampilkan aneka produk coklat Indonesia, khususnya produk coklat dari Puslitkoka Jember, Chocodot, Monggo, BT Cocoa, dan Ceres, serta ragam buah kakao asal Indonesia, biji kakao serta bubuk kakao. ▲



Indonesia only needs one Tin Exchange



Government has not opened opportunity to other party to carry out tin exchange as has been regulated on Trading Ministry

Regulation No. 32 year 2013 on tin export. According to Coftra Chief of Analysis Bureau, Mardjoko, currently Indonesia only needs one executants exchange for tin trading.

“The benefit of one exchange, we as the biggest tin exporter in the world can control international price. All this time, tin price was determined by foreign market so we do not receive any benefit. So the price tends to be controlled by buyers and this is not fair,” Mardjoko explained.

Moreover Mardjoko also said that the submission of tin physical market permit by Serumpun Tin has not been processed until present day.

“As an independent nation, we have to show to the world that Indonesia only has one exchange and one price. Therefore, for small medium smelter that has not been incorporated in existing tin exchange, we hope they can join and use laboratory of bigger company so that they can sell their production at tin exchange,” Mardjoko explained.

“Once the market disappointed with the quality of tin that was transacted on the exchange, the market trust towards exchange will descend. The impact is Indonesian tin export volume will decrease and we can loss the market,” Mardjoko said. ▲

Local Government proactive on WRS will be more tremendous

Trading Ministry Gita Wirjawan requests local government to be more proactive on implementing warehouse receipt system so people can have alternative cheap funding after harvest. Moreover, local government has to implement budgeting politic to allocate warehouse receipt system development from APBD fund.

“Referring to commodity potency that Indonesia has, 82 warehouse unit of WRS that was built by government will not be sufficient. The capacity of the WRS warehouse

only can accommodate 5% of the total of Indonesian food. Therefore Coftra has mapped private warehouses or BUMN in that area to be used as WRS warehouse,” Gita Wirjawan explained recently in one occasion.

Furthermore he said, “If the WRS storage only 5%, the farmer will not get more credit than the existing one. But if this is rolled more than 5% or reach 30%, this WRS will be tremendous.”

Central Java province government currently has 11 unit warehouses, Gita added. “But if it is compared with the potency of

commodity that will be stored in the warehouse, the total WRS in Central Java will not be enough.”

“The Central Java Province Government has to be able to improve the total WRS warehouse in the future. For that they can have good cooperation with PT Pos, PT Pegadaian, Perpadi, BRI and local banking. So far Central Java WRS is quiet good, but the warehouse in Central Java is still less. If they can build more I am sure they will have support from banking sector,” Gita Wirjawan added. ▲

Coftra policy give legal certainty to Investor

Improving the protection for society from all disserved actions and giving legal certainty to all business parties whose doing future trading activity, Coftra always takes review and improvement towards existing regulations.

“Besides that, we also review and develop new regulations as innovative or preventive steps to cover the gap on futures trading law regulation,” Coftra Chief, Sutriyono Edi mentioned to press recently.

Like the Coftra chief regulation on Accountancy guidance on futures broker, its aim is to increase the effectiveness of Coftra surveillance on the obligation of futures broker monetary report delivery that can be easily un-

derstood, relevant, reliably and can be compared as per Monetary Accountancy standard.

For Futures Broker Representative, Sutriyono said that Coftra also arranges it to improve the discipline of licensing, supervision effectiveness, and professionalism of future broker representative.

“The regulation of futures broker representative is accompanied by the implementation of professional exam procedure to increase the professionalism of futures broker representative candidates,” Sutriyono explained.

Moreover Sutriyono said that Coftra also issued regulation on the obligation of reporting on suspicious monetary transaction for futures broker and the

provision of reporting on suspicious monetary transaction to Monetary Transaction Analysis and Reporting Centre. “This policy is for prevention and eradication of money laundry and terrorism activity funding.”

“Currently, Coftra is still working on 2 new policies on Marketing Sources, the aim is for marketing sources who help futures broker in offering futures contract, Syariah Derivative contract, and or other derivatives contracts can be ruled and supervised by futures broker. The other aim is to complete the existing regulation, so it will be more comprehensive on futures broker behavior such as mandatory action or forbidden one,” Sutriyono Edi said. ▲

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Resi Gudang Terbit	Nilai Barang (Rp)	Bank/LKNB
1.	PT. PERTANI				
	- Probolinggo (Krasan)*	Gabah	2	1.165.000.000	Bank Jatim
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	9	824.000.000	Bank BJB
	- Probolinggo (Banyuanyar)*	Gabah	1	740.000.000	Bank Jatim
	- Sidrap	Gabah	4	1.471.470.000	Bank BRI
		Beras	2	1.526.490.000	BRI dan BJB
	- Pinrang	Gabah	2	540.000.000	Bank BRI
	- Sampang (Banyuates)*	Jagung	1	51.000.000	Bank Jatim
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	25	1.899.750.000	Bank BJB
	- Bojonegoro*	Gabah	2	41.000.000	Bank Jatim
2.	PT. BHANDA GHARA REKSA				
	- Barito Kuala*	Gabah	2	132.000.000	Bank Kalsel
3.	KOPERASI NIAGA MUKTI				
	- Cianjur*	Gabah	2	267.800.000	Bank BJB
	JUMLAH	Gabah	49	7.081.020.000	
		Beras	2	1.526.490.000	
		Jagung	1	51.000.000	
	TOTAL		52	8.658.510.000	

PENERBITAN RESI GUDANG BULAN SEPTEMBER 2013

NO.	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga Rata-Rata (Rp/kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Probolinggo (Krasan)*	Gabah	2	495	4.400	2.178.000.000
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	36	140	5.000	700.000.000
	- Probolinggo (Banyuanyar)*	Gabah	1	200	3.400	680.000.000
	- Sidrap	Gabah	5	20	7.000	140.000.000
		Beras	4	170	5.500	935.000.000
	- Pinrang	Gabah	2	65	5.169	336.000.000
	- Sampang (Banyuates)*	Jagung	1	140	5.000	700.000.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	36	200	3.400	680.000.000
	- Bojonegoro*	Gabah	4	20	7.000	140.000.000
2.	PT. BHANDA GHARA REKSA					
	- Barito Kuala*	Gabah	4	65	5.169	336.000.000
3.	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Cianjur*	Gabah	2	20,66	5.000	103.290.000
	JUMLAH	Gabah	92	2897,01	5.099	15.287.187.500
		Beras	4	650	6.783	4.408.750.000
		Jagung	1	18	4.200	73.500.000
	TOTAL		97	3.564,51		19.769.437.500

*) Gudang milik Pemerintah Kabupaten/Kota
*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



INDIKATOR HARGA PLKA BULAN SEPTEMBER 2013

NO.	DERAH	KOMODITI	JENIS	HARGA TERENDAH	HARGA TERTINGGI	GUDANG SERAH
1.	Bali / 20 September 2013	PISANG	Batang Pisang Batu	Rp. 6.000,-/Batang	Rp. 6.000,-/Batang	Payangan - Bali
		BABI	Bibit	Rp. 480.000,-/Ekor	Rp. 480.000,-/Ekor	Denpasar - Bali
		SAPI	Pejantan	Rp. 33.000,-/Kg	Rp. 33.000,-/Kg	Negosiasi
2.	Gorontalo / 26 September 2013	KAYU MANIS	Lokal	Rp. 8.000,-/Kg	Rp. 8.000,-/Kg	Gorontalo
		GAPLEK	Standar	Rp. 2.750,-/Kg	Rp. 2.750,-/Kg	Negosiasi
		BERAS	IR 64 Setra	Rp. 7.500,-/Kg	Rp. 7.500,-/Kg	Gorontalo
		JAGUNG	Pipilan Kering	Rp. 2.800,-/Kg	Rp. 2.800,-/Kg	Gorontalo
3.	Jambi / 11 September 2013	KEDELAI	Lokal	Rp. 8.500,-/Kg	Rp. 8.500,-/Kg	Jambi
		KARET	Lump	Rp. 13.700,-/Kg	Rp. 13.700,-/Kg	Jambi
4.	Bandung / 17 September 2013	TELUR AYAM	Broiler	Rp. 15.000,-/Kg	Rp. 15.000,-/Kg	Bandung
5.	Sidoarjo / 24 September 2013	KOPI	Robusta	Rp. 29.000,-/Kg	Rp. 29.000,-/Kg	Surabaya
		KACANG TANAH	Basah Hibrida	Rp. 6.000,-/Kg	Rp. 6.000,-/Kg	Jakarta Timur
6.	Makassar / 23 September 2013	KOPI	Arabika	Rp. 55.000,-/Kg	Rp. 55.000,-/Kg	Makassar

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

TRANSAKSI PASAR LELANG

NO.	DAERAH	NILAI TRANSAKSI 2013 (Rp.)	
		AGUSTUS	SEPTEMBER
1.	Sumatera Barat	1.154.450.000	4.472.462.500
2.	Jambi	-	3.182.120.000
3.	Lampung	3.603.805.600	20.009.100.000
4.	Jawa Barat	20.401.500.000	14.826.500.000
5.	Jawa Tengah	25.624.000.000	10.655.000.000
6.	Yogyakarta	22.265.800.000	8.827.000.000
7.	Jawa Timur	10.744.500.000	45.660.000.000
8.	Bali	-	1.287.900.000
9.	NTB	-	4.128.250.000
10.	Sulawesi Utara	18.826.600.000	11.339.350.000
11.	Sulawesi Selatan	-	5.500.000
12.	Sulawesi Tenggara	-	1.846.500.000
13.	Gorontalo	-	4.290.500.000
14.	DKI Jakarta	26.335.500.000	-
TOTAL		102.620.655.000	130.530.182.500
GRAND TOTAL JANUARI – SEPTEMBER		737.888.572.100	

10 BESAR KOMODITI PASAR LELANG PERIODE SEPTEMBER 2013

NO.	KOMODITAS	VOLUME/TON	TOTAL/RP
1.	Beras	3.835	31.457.200.000
2.	Lada	240	18.000.000.000
3.	Rumput Laut	1.177	16.439.000.000
4.	Jagung	5.520	15.794.000.000
5.	Kacang Tanah	1.125	14.178.500.000
6.	Sapi	157.500	5.317.500.000
7.	Gula Pasir	400	4.005.000.000
8.	Kopi	128	3.456.500.000
9.	Kentang	360	2.700.000.000
10.	Coklat	83	1.491.000.000

*Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



Kinerja Gudang SRG

Hingga triwulan ketiga tahun 2013, Resi Gudang yang diterbitkan telah mencapai sebanyak 1.100 resi dengan nilainya sebesar Rp 218,77 miliar. Dilihat dari potensinya, pencapaian itu masih sangat jauh dari harapan. Sebab itu Pemerintah Daerah harus proaktif implementasikan SRG. Bisa?

Tahap awal penerapan Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia terdapat sebanyak delapan komoditi yang dapat disimpan dalam gudang SRG seperti yang tertuang di Permendag No: 26/M-DAG/PER/6/2007. Pada Permendag itu terdapat sebanyak tiga komoditi berorientasi pada terciptanya Ketahanan Pangan Nasional yakni komoditi Gabah, Beras dan Jagung dan 5 komoditi berorientasi pada peningkatan Ekspor adalah Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut.

Kemudian melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/11/2011, ada satu komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG yakni komoditi Rotan. Dan yang terakhir, melalui Keputusan Menteri Perdagangan No. 08/M-DAG/PER/02/2013, terdapat satu komoditi yang dapat disimpan gudang SRG yaitu komoditi Garam.

Sehingga sampai saat ini ada sepuluh (10) komoditi yang dapat disimpan di gudang dalam penyelenggaraan SRG yang berorientasi pada terciptanya Ketahanan Pangan yaitu Gabah, Beras dan Jagung dan komoditi yang berorientasi pada peningkatan Ekspor seperti komoditi Kopi, Kakao, Lada, Karet, Rumput Laut dan Garam. Selanjutnya komoditi dalam SRG dapat ditambah berdasarkan pada usulan dari Pemda, instansi terkait dan asosiasi komoditi dengan memperhatikan persyaratan daya simpan, standard mutu dan jumlah minimal barang yang disimpan.

Untuk mempercepat pelaksanaan SRG secara nasional, Kementerian Perdagangan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan sebanyak 97 unit

gudang SRG secara bertahap. Pada tahun 2009, melalui Dana Stimulus Fiskal Kementerian Perdagangan TA 2009 dilakukan pembangunan 41 Gudang SRG yang tersebar di 34 kabupaten pada 10 provinsi, terdiri dari gudang flat sebanyak 35 gudang yang akan digunakan untuk penyimpanan komoditi gabah dan beras, dan 6 gudang silo untuk penyimpanan komoditi Jagung (Garut, Sumenep, Minahasa Selatan, Takalar dan Gorontalo).

Pada tahun 2010 gudang-gudang flat yang dibangun tersebut telah dilengkapi dengan mesin pengering (dryer) sehingga diharapkan gudang-gudang tersebut sudah dapat beroperasi penuh.

Pada tahun 2010, melalui dana APBN-P 2010 Kementerian Perdagangan dibangun kembali 11 gudang SRG yang tersebar di 11 kabupaten/kota pada 10 propinsi.

Pada tahun 2011, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2011 Bappebti Kementerian Perdagangan bersama Pemerintah Daerah juga membangun 15 gudang SRG tersebar di 15 kabupaten. Gudang-gudang ini telah dilengkapi dengan sarana mesin pengering (dryer), sehingga dapat langsung dimanfaatkan sebagai gudang SRG. Dan pada tahun 2012, melalui DAK 2012 Bappebti Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah kembali melakukan pembangunan 14 gudang di 14 kabupaten. Gudang yang dibangun ini juga sudah dilengkapi dengan mesin pengering (dryer).

Selanjutnya di tahun 2013, melalui DAK 2013 Bappebti Kementerian Perdagangan bersama dengan Pemerintah Daerah kembali melakukan pembangunan 17 gudang di 17 kabupaten. Gudang yang dibangun ini juga sudah dilengkapi

dengan mesin pengering (dryer).

Gudang-gudang SRG yang dibangun tersebut kemudian diserahkan penguasaannya kepada Pemerintah daerah setempat yang ke depannya kemudian akan dikelola oleh pengelola gudang berbentuk Koperasi atau BUMD setempat secara profesional dan mendapat izin dari Bappebti, setelah sebelumnya mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Pengelola Gudang yang telah memperoleh persetujuan Bappebti.

Hingga saat ini SRG sudah dilaksanakan di 45 kabupaten/kota, meliputi Bener Meriah, Simalungun, Indramayu, Bogor, Subang, Cianjur, Pekalongan, Karanganyar, Bantul, Demak, Jombang, Jepara, Banyumas, Kudus, Madiun, Mojokerto, Sragen, Nganjuk, Ngawi, Situbondo, Banyuwangi, Pasuruan, Probolinggo, Tulungagung, Sampang, Barito Kuala, Lombok Timur, Bantaeng, Sidrap, Pinrang, Gowa, Sumbawa, Grobogan, Sumedang, Ciamis, Tangerang, Lombok Barat, Lebak, Tuban, Pasaman Barat, Deli Serdang, Kota Makassar, Bojonegoro, Blitar dan Wonogiri untuk komoditi Gabah, Jagung, Beras, Kopi dan Rumput Laut.

Penerbitan Resi Gudang

Secara akumulatif hingga awal Oktober 2013, jumlah Resi Gudang yang telah diterbitkan sebanyak 1.100 resi dengan total volume komoditi sebanyak 44.676,86 ton masing-masing sebanyak 38.330 ton gabah, 4.407,2ton beras, 1.591,7 ton jagung, 20,39 ton kopi, dan 327 ton rumput laut. Sedangkan nilainya telah mencapai Rp 218,77 miliar

Dengan semakin berkembangnya implementasi SRG, transaksi Resi Gudang menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Dapat dilihat pada



tahun 2012 dimana jumlah resi yang diterbitkan mencapai 379 resi dengan nilai mencapai Rp 93,18 miliar, atau meningkat sebesar 40 % dibandingkan total penerbitan resi sepanjang tahun 2011 yang sebanyak 271 resi dengan nilai mencapai Rp 40,06 miliar.

Walaupun mengalami peningkatan, namun potensi volume hasil panen petani secara nasional masih cukup besar, sehingga volume komoditi yang disimpan dalam gudang SRG masih perlu ditingkatkan agar dapat menjadi salah satu tolak ukur pemerintah dalam memperhitungkan stok pangan nasional.

Dari sisi pembiayaan Resi Gudang telah dilakukan oleh lembaga keuangan bank seperti BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun Lembaga Keuangan Non-Bank yaitu PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM. Nilai total pembiayaan yang telah diberikan hingga awal Oktober 2013 mencapai sebesar Rp 126,17 miliar (834 resi diagunkan) atau rata-rata 70 % dari nilai Resi Gudang yang diagunkan.

Untuk meringankan beban bunga bank dalam pemanfaatan SRG, khususnya bagi Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi Tani, pemerintah telah menerbitkan peraturan tentang pemberian Subsidi Bunga Kredit Resi Gudang melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 171/PMK.05/2009 tentang Skema Subsidi Resi Gudang (SRG). Untuk pelaksanaan skema Subsidi Resi Gudang tersebut, telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Perdagangan No. 66/M-DAG/PER/12/2009 tentang Pelaksanaan Skema Subsidi Resi Gudang. Subsidi Bunga ini akan disalurkan melalui bank-bank pelaksana yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Bank-bank yang saat ini telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai Bank Penyalur S-SRG adalah Bank BRI, Bank Jabar, Bank Jateng, Bank Jatim, Bank DIY dan Bank Kalsel. Beban bunga kepada peserta (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani dan Koperasi) S-SRG ditetapkan sebesar 6 % per-tahun. Sedangkan selisih tingkat bunga S-SRG dengan beban bunga Peserta S-SRG merupakan subsidi Pemerintah. Subsidi bunga diberikan selama masa jangka waktu S-SRG paling lama 6 bulan.



Lembaga SRG

Sesuai dengan peraturan untuk dapat ikut serta sebagai lembaga di dalam SRG, maka pelaku SRG harus mendapat persetujuan dari Bappebti. Ada pun Persetujuan Kelembagaan yang telah dikeluarkan hingga Juli 2013 terdapat sebanyak 107 persetujuan yang terdiri;

manfaat tersedianya Dana Jaminan SRG, antara lain, dana jaminan SRG akan meningkatkan integritas SRG dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dari skala kecil (petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi) sampai skala besar (pedagang, processor, exportir, dan perusahaan perkebunan) termasuk

Gudang	: 77 persetujuan
Pengelola Gudang	: 10 persetujuan
LPK Inspeksi Gudang	: 3 persetujuan
LPK Manajemen Mutu	: 2 persetujuan
LPK Uji Mutu Komoditi	: 18 persetujuan
Pusat Registrasi	: 1 persetujuan

Semenetara itu, menindaklanjuti amanah yang diberikan dalam UU Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, maka pada tahun 2012 Bappebti bersama dengan kementerian lain terkait sedang mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang pembentukan Lembaga Jaminan Resi Gudang yang akan mengelola Dana Jaminan dalam Sistem Resi Gudang. Pada saat ini, pembahasan RPP tersebut telah memasuki tahap final dan direncanakan siap ditandatangani Presiden pada akhir tahun 2013.

Beberapa hal yang menjadi

bank/lembaga keuangan non-bank. Hal ini juga dapat mempercepat pemanfaatan SRG secara nasional.

Di sisi lain, pelindung atau pun jaminan seperti asuransi yang biayanya relatif terjangkau bagi pelaku usaha yang dapat meng-cover apabila Pengelola Gudang mengalami pailit atau melakukan kelalaian dalam pengelolaan barang sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya mengembalikan barang yang disimpan di gudang sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang tertera dalam Resi Gudang. ▲



Mengukur Risiko Investasi

*) Mark JP Anson, Ph.D., CFA,



Teoris keuangan mengatakan bahwa investor harus mengharapkan hubungan yang positif antara risiko dan return. Itu artinya, mereka yang menganggap risiko pasar lebih tinggi mengharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Dan sebaliknya, portofolio risiko yang lebih rendah mendapatkan hasil yang lebih rendah juga.

Namun, seorang investor seharusnya tidak mengharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dengan menerima tingkat risiko yang lebih tinggi pula. Karena pasar tidak mengkompensasi investor untuk risiko yang dengan mudah dapat didiversifikasi.

Kunci untuk menentukan investasi adalah pengukuran untuk memperkirakan besarnya risk-return tradeoff yang dapat berbeda di seluruh investasi dan manajer investasi. Pengukuran kinerja dapat menunjukkan bahwa return tinggi namun tidak menarik mengingat tingkat risiko yang luar biasa tinggi, sementara tingkat yang lebih rendah pengembalian mungkin cukup menarik jika mereka datang dengan risiko minimal.

Ada dua jenis utama dari ukuran kinerja. Pertama, rasio pengembalian terhadap risiko. Sebuah risiko dapat dinyatakan dalam banyak cara penyebut. Penyebut dari rasio tersebut dapat berupa ukuran risiko, meskipun ukuran kinerja yang paling populer menggunakan langkah-langkah risiko yang paling banyak digunakan, seperti volatilitas (deviasi standar) atau beta. Ukuran risiko mungkin perkiraan diamati risiko atau keyakinan investor tentang risiko yang diharapkan. Rasio ini termasuk yang dikembangkan oleh

William Sharpe, Treynor Jack dan Frank Sortino.

Metode kedua untuk mengukur kinerja adalah untuk menghasilkan return risk-adjusted aset dan membandingkan kembali ke standar. Ukuran alpha yang dikembangkan oleh Michael Jensen, membandingkan laba atas investasi yang diharapkan dari investasi risiko yang sama.

Rasio Sharpe

Uukuran kinerja risiko yang paling populer untuk disesuaikan dengan investasi adalah rasio Sharpe.

Bila menggunakan pengembalian tahunan dan standar deviasi tahunan, rasio Sharpe dapat ditafsirkan sebagai premi risiko tahunan bahwa investasi yang diperoleh per titik persentase standar deviasi tahunan. Dalam hal ini, pengembalian investasi melebihi tingkat tanpa risiko sebesar 35 basis poin untuk setiap titik persentase deviasi standar. Dalam sebuah analisis dari data masa lalu, return rata-rata portofolio digunakan sebagai perkiraan pengembalian yang diharapkan, dan standar deviasi historis sampel digunakan sebagai perkiraan risiko yang benar aset. Sepanjang analisis kinerja ini, analisis dapat dipandang sebagai dipertukarkan antara menggunakan perkiraan historis dan harapan.

Sehingga, baik pembilang maupun penyebut dari rasio Sharpe harus diukur dalam satuan waktu yang sama, seperti nilai-nilai triwulanan atau tahunan. Tapi rasio Sharpe yang dihasilkan sensitif terhadap panjang periode waktu yang digunakan untuk menghitung pembilang dan penyebut. Dan perlu diperhatikan bahwa pembilang sebanding dengan unit

waktu, mengabaikan peracikan. Jadi excess return dinyatakan sebagai tingkat tahunan akan dua kali lebih besar dari tingkat tengah tahunan dan empat kali lebih besar dari tingkat kuartalan.

Akhirnya, rasio Sharpe hanya berguna sebagai volatilitas dalam mengukur risiko. Dalam kasus pengembalian terdistribusi normal, volatilitas sepenuhnya menggambarkan dispersi dalam hasil. Namun dalam banyak alternatif investasi dengan tingkat miring dan kurtosis yang menyimpang dari distribusi normal, volatilitas hanya menyediakan ukuran parsial dispersi. Dengan demikian, rasio Sharpe adalah ukuran kinerja risiko yang disesuaikan dengan kembalinya aset dengan distribusi non-normal. Rasio Sharpe harus digunakan dengan hati-hati ketika mengukur kinerja investasi tertentu, seperti opsi dan strategi opsi, yang memiliki distribusi tingkat pengembalian yang miring atau mengandung potensi hadiah non-linear.

The Treynor Ratio

Teoris lain yang populer mengukur kinerja risiko adalah rasio Treynor. Berbeda dengan rasio Sharpe, rasio ini menggunakan beta sebagai ukuran risiko dalam penyebut daripada standar deviasi.

The Treynor ratio dapat ditafsirkan sebagai premi risiko yang mendapatkan investasi per unit beta.



The Treynor rasio tergantung pada satuan waktu yang digunakan untuk mengekspresikan kembali investasi. Umumnya, beta suatu aset, penyebut dari rasio tersebut, akan diharapkan menjadi sangat mirip, terlepas dari satuan waktu yang digunakan untuk mengekspresikan kembali.

Namun, mengabaikan peracikan kembali triwulanan akan diharapkan menjadi seperempat besarnya pengembalian tahunan, dan pengembalian yang diharapkan bulanan menjadi satu banding dua belas besarnya pengembalian tahunan. Jadi pembilang sebanding dengan satuan waktu, dan penyebut adalah sekitar independen dari satuan waktu, yang berarti bahwa rasio sebanding dengan unit waktu.

The Treynor Rasio mudah ditafsirkan sebagai excess return yang diperoleh dengan menanggung risiko sistematis. Berbeda dengan rasio Sharpe, rasio Treynor tidak boleh digunakan secara berdiri sendiri. Beta adalah ukuran dari hanya satu jenis risiko, yakni risiko sistematis. Oleh karena itu, memilih investasi yang berdiri sendiri atas dasar rasio Treynor mungkin cenderung untuk memaksimalkan excess return per unit dari risiko sistematis tetapi tidak memaksimalkan excess return per unit dari total risiko kecuali setiap investasi yang terdiversifikasi dengan baik.

Beta tidak berfungsi sebagai langkah yang tepat dari risiko marginal menambahkan investasi portofolio yang terdiversifikasi. Oleh karena itu, rasio Treynor dirancang untuk membandingkan investasi terdiversifikasi dan membandingkan investasi yang akan ditambahkan ke portofolio yang terdiversifikasi. Tapi rasio Treynor tidak boleh digunakan untuk membandingkan investasi buruk diversifikasi secara berdiri sendiri. Hal ini jarang diterapkan dalam investasi alternatif, karena beta bukan merupakan ukuran risiko yang tepat bagi banyak strategi investasi alternatif.

The Sortino Ratio

Suatu ukuran kinerja risiko yang disesuaikan cenderung digunakan pada investasi alternatif dari pada investasi tradisional. Berbeda dengan rasio Sharpe, rasio Sortino mengurangi kembali patokan daripada tingkat tanpa risiko dari pengembalian aset dalam pembilang. Teori ini juga menggunakan downside deviasi standar, bukan standar deviasi sebagai ukuran risiko dalam penyebut.

Oleh karena itu, rasio Sortino dapat digunakan untuk investasi dengan pengembalian miring, terutama yang risiko downside tampaknya lebih besar dari potensi upside. Sebagai penyimpangan semistandard, target semistandard deviasi (TSSD) berfokus pada penyimpangan downside. Sebagai penyimpangan semistandard sasaran, TSSD mendefinisikan penyimpangan downside sebagai penyimpangan negatif relatif terhadap target return daripada kembali rata-rata atau nol. Dengan demikian, rasio Sortino menggunakan konsep target angka pengembalian baik dalam mengekspresikan kembalinyaalam pembilang dan risiko dalam penyebut.

Bahkan jika target return diatur sama dengan tingkat tanpa risiko, rasio Sortino tidak sama dengan rasio Sharpe. Meskipun mereka akan berbagi pembilang sama, penyebut akan sama hanya untuk distribusi simetris dan di mana pengembalian rata-rata aset menyamai tingkat tanpa risiko.

Intinya bahwa penekanan rasio Sortino adalah penggunaan risiko downside daripada penggunaan tingkat target kembali. Sampai-

sampai distribusi pengembalian nonsymmetrical dan bahwa investor difokuskan pada risiko downside, rasio Sortino dapat berguna sebagai indikator kinerja.

Jensen Alpha

Alpha Jensen merupakan model faktor tunggal yang menghubungkan pengembalian yang diharapkan dari investasi dan jumlah risiko beta terjadi. Alpha Jensen juga dapat mengukur langsung jumlah absolut dimana aset diperkirakan mengungguli dan jika positif pengembalian aset secara efisien dari harga risiko sistematis yang sama dalam model faktor tunggal. Hal ini menggoda untuk menggambarkan kembalinya dalam konteks model harga aset modal (CAPM), namun tegasnya tidak ada aset menawarkan alpha nol dalam dunia CAPM, karena semua aset adalah harga efisien. Dalam prakteknya, pengembalian yang diharapkan atas aset dan pasar, serta beta merupakan aset sejati yang tidak teramati.

Jadi, Jensen alpha biasanya diestimasi dengan menggunakan data historis sebagai mencegat (a) dari persamaan regresi sebagai berikut: $R_t - R_f = a + b(R_{m,t} - R_f) + e_t$ dimana R_t adalah return dari portofolio atau aset pada periode t, $R_{m,t}$ adalah return portofolio pasar dalam waktu t, sebuah intersep diperkirakan regresi, b adalah koefisien slope estimasi regresi dan e_t adalah residual dari regresi dalam waktu t.

Istilah error e_t memperkirakan kembalinya portofolio dalam waktu t, b adalah perkiraan beta portofolio dan perkiraan rata-rata abnormal return. Karena mencegat, a, diperkirakan, harus ditafsirkan sesuai dengan tingkat kepercayaan. Tingkat positif dari alpha outperformance, yang berarti bahwa manajer telah menerima kembali dari yang dibenarkan oleh jumlah risiko yang dilakukan. Sebaliknya, langkah-langkah alpha negatif underperformance, di mana laba atas investasi yang lebih rendah dari perkiraan untuk jumlah risiko yang terjadi. ▲

*) Penulis buku CAIA Level I: An Introduction to Core Topics in Alternative Investments, Print + eBook, 2nd Edition



Herman Agusney

Dari Birokrat Jadi Praktisi

Setelah purnabakti sebagai PNS di Bappebti akhir 2007, lalu apa kabar Herman Agusney?

Sepertinya, tak ada kata pensiun bagi pria kelahiran di Sibolga, Sumut, 19 September 1951 ini. Setelah mengakhiri jabatannya sebagai Kabag Biro Perniagaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sejak 1 Oktober 2007, lalu, Herman Agusney atau yang akrab disapa Herman, kini aktif di industri Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Tepatnya, Herman duduk sebagai Direktur Utama (Dirut) di sebuah Perusahaan Pedagang yakni PT Aperdi.

“Usia boleh bertambah, tetapi pengetahuan dan pengalaman harus tetap dicari. Itulah motivasi saya saat pertama kali akan terjun ke industri ini,” kata Herman, saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung Plaza UOB Lt 24, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Lalu, bagaimana Herman bisa menjadi pelaku di industri PBK? Alkisah,

sejak tahun 1994 hingga 2007 Herman tercatat sebagai pegawai Bappebti. Tentu saja tak mengherankan, jika saat itu Herman banyak berhubungan dengan perusahaan Pialang Berjangka ataupun Pedagang Berjangka.

Nah, menurut Herman, sebelum habis masa baktinya bersama Bappebti, ternyata ada 3 perusahaan yang menyodorkan pekerjaan kepadanya. “Saya sempat bingung juga untuk menjatuhkan pilihan, akhirnya setelah habis masa bakti di Bappebti, saya memutuskan untuk bergabung di salah satu perusahaan pialang,” kenang Herman.

Dan pada 31 Mei 2009, Herman pun pindah perusahaan dan menjadi direktur utama di perusahaan tersebut. Lalu pada 11 Desember 2012, Herman mengundurkan diri dari perusahaan pialang tersebut kemudian pada 15 Januari 2013, resmi menjabat Dirut PT Aperdi.

Dalam beberapa tahun bergelut di industri ini, prestasi Herman ternyata cukup menarik. Menurut ayah dari Audila, Hervimo, dan Mohammad Baudouin, ini, dirinya dikenal sebagai pemecah masalah. “Saya masuk ketika perusahaan sedang krisis integritas dan kepercayaan baik di sisi regulator maupun di masyarakat. Lalu saya berusaha benahi permasalahan itu dan ternyata berhasil,” ungkapnya.

Begitupun dengan PT Aperdi, Herman dengan sekuat tenaga membenahi permasalahan yang ada di perusahaan itu. “Alhamdulillah, akhirnya sekarang Aperdi sudah mulai dipercaya lagi oleh Bappebti,” katanya.

Dan dari semua pengalamannya itu, Herman menyimpulkan, industri ini masih kekurangan SDM- sumber daya manusia yang memahami substansi dan peraturan di bidang perdagangan berjangka komoditi.



PT Aperdi, kata pria yang gemar bermain bulutangkis ini, adalah perusahaan pedagang penyelenggara transaksi bilateral yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif (SPA). Dan Aperdi tidak menyelenggarakan transaksi komoditi multilateral. Namun perlu diingat, transaksi SPA telah dikenal sebagai 'suplemen' bagi industri PBK di tanah air.

"Kami fokus pada sistemnya, yakni sistem metaquotes. Dan sistem yang kami pakain ini telah di kontrak dengan salah satu perusahaan dari Rusia. Tapi servernya ada di Singapura," jelasnya.

Jadi, kata Herman, Aperdi bertugas menjaga gangguan teknis dari sistem tersebut agar transaksi SPA dapat berjalan

“
Usia boleh bertambah, tetapi pengetahuan dan pengalaman harus tetap dicari. Itulah motivasi saya saat pertama kali akan terjun ke industri ini.
”



lancar. "Jangan sampai ada gangguan teknis seperti kebakaran, banjir dan lainnya. Kalau ada gangguan pada sistem akan banyak transaksi yang tidak bisa diinput dan harus menggunakan manual, dan itu bisa menimbulkan banyak complain dari nasabah," ujarnya.

Untuk saat ini, jelas Herman, ada sebanyak 11 perusahaan pialang yang menjadi mitra dan transaksinya bermuara ke PT Aperdi. "11 Pialang itu merupakan member dari Jakarta Futures Exchange (JFX) ataupun dari Bursa Komoditi & Derivatif Indonesia (BKDI)," kata Herman.

Liku-Liku Karir

Suami dari Mola Seira Herman ini mengawali karirnya sebagai salah satu Staf di Kantor Departemen (Kandep) Perdagangan, di Kabupaten

Malang, Jawa Timur pada 1 Maret 1979. Lalu, di tahun 1982, Alumni Fak. Ekonomi, Univ. Brawijaya tahun 1978 ini, dipercaya sebagai Kepala Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP) di tempat yang sama.

"Setelah masuk ke Dinas Perdagangan di Malang, saya mengikuti tes Harvard Institute for International Development (HIID). Tes itu merupakan tes angkatan pertama yang disponsori HIID," kata Herman.

Yang membanggakan, saat itu Herman lolos tes dan mendapatkan beasiswa dari HIID untuk melanjutkan studi S2 di Ohio University, Amerika Serikat. "Dari seluruh peserta tes dari Indonesia hanya ada 66 peserta tes yang lolos. Dan dari Departemen Perdagangan hanya ada 6 orang, salah satunya saya," ungkap Herman bangga.

Selanjutnya, pada 4 Desember 1990, Herman diangkat menjadi Kasubag Penyusunan Rencana, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan (saat itu). "Dan ditahun 1992, saya juga pernah ditugaskan di Atase Perdagangan di Belgia," katanya. Barulah, pada 27 April 1994, Herman akhirnya ditarik ke Bappebti dengan jabatan awal sebagai Kasubag Publikasi Bappebti.

Semenjak itu, Herman menetap dan mengabdikan di Bappebti dengan beberapa kali perubahan jabatan. Dan akhirnya, sejak tahun 2005 hingga 2007, Herman menghabiskan masa kerjanya sebagai Kabag Pengawasan Keuangan dan Audit Bappebti. "Itu menjadi jabatan terakhir saya di Bappebti," jelas Herman.

Tentunya, sudah banyak asam-garam yang telah ia rasakan dalam menggeluti karir panjangnya sebagai pegawai di pemerintahan. Meskipun sudah memasuki masa pensiun, kini Herman tetap produktif bergelut di industri perdagangan berjangka komoditi.

"Di usia saya sekarang ini, memang saya lebih enjoy berada di perusahaan ini. Berbeda ketika saya berada di perusahaan pialang, harus berhadapan langsung dengan permasalahan nasabah dan tentunya ada target-target yang diberikan oleh Bappebti," kata Herman sambil tersenyum.

Sementara untuk ambisi pribadinya, Herman bertekad dapat membiayai anak bungsunya, Mohammad Baudouin hingga lulus kuliah. "Si bungsu itu kuliah di sekolah penerbangan di Bali, biayanya cukup lumayan mahal," ujarnya.

Meski demikian, Herman bersyukur, saat ini dirinya masih memiliki penghasilan lebih dengan bekerja sebagai Dirut PT Aperdi. "Setelah nanti anak lulus kuliah, kemungkinan saya ingin beristirahat dan menikmati hari tua saya di rumah," imbuhnya.

Dan, kepada Buletin Berjangka, Herman menitipkan sebuah pesan, dan pesan itu juga menjadi motto hidupnya selama ini. Pesan itu juga merupakan nasihat dari seorang imam besar Al-Ghazali? "Hiduplah sekehendak hatimu, tapi ingat, kamu akan mati. Cintailah siapa saja yang kamu suka. Tetapi ingatlah, kamu akan berpisah dengannya. Buatlah sesuka hatimu. Tetapi ingat, kamu akan mendapatkan balasan setimpal dengan perbuatanmu itu," tutup Herman. ▲

Bijak Berinvestasi

